

PENTINGNYA PERSEPSI GENERASI Z DI KOTA SALATIGA TERHADAP INTEGRITAS DAN SIKAP ANTI KORUPSI

Oleh: Daru Purnomo¹, Tunjung Wijanarka², Kris Julis Iman Murni Waruwu³,
Rr. Sri Rejeki Anggraeni Kartodinoto⁴

^{1,3,4} Sosiologi, Universitas Kristen Satya Wacana ²Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract

This paper tries to describe the issue of corruption which is still one of the latent and systemic problems for the Indonesian nation. Proven by corruption, many losses ultimately have an impact on society at large. Democracy has proven to be incapable of overcoming the problem. The democratic concept of limiting power and the role of the people as the highest ruler does not really make Indonesia, which is a democratic country, free from corruption cases. In fact, perpetrators of corruption crimes in Indonesia are dominated by those who have higher education. This picture shows that high education is not directly proportional to integrity and anti-corruption attitudes. Therefore, this study seeks to examine the importance of perceptions of integrity and anti-corruption attitudes among Generation Z in Salatiga City as the nation's successors in the future. Through descriptive quantitative research methods, the author obtained research results that Generation Z in Salatiga City has a good perception of anti-corruption attitudes which can be the basis for avoiding corrupt practices. Thus, the author concludes that the perception of integrity and anti-corruption culture has an important role in building and preventing attitudes that lead to corruption, especially among Generation Z in Salatiga City.

Key Word: Anti-corruption, Generation Z, integrity, Salatiga City.

Abstrak

Tulisan ini berusaha menggambarkan tentang isu korupsi yang masih menjadi salah satu permasalahan laten dan sistemik bagi bangsa Indonesia. Terbukti dengan adanya korupsi, banyak kerugian-kerugian yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat secara luas. Demokrasi terbukti tidak sepenuhnya mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Konsep demokrasi tentang pembatasan kekuasaan dan berperannya rakyat sebagai penguasa tertinggi tidak benar-benar menjadikan Indonesia yang merupakan negara demokratis menjadi bebas dari kasus korupsi. Bahkan, pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia didominasi oleh mereka yang memiliki pendidikan tinggi. Gambaran ini menunjukkan bahwa tingginya pendidikan tidak berbanding lurus dengan integritas dan sikap anti korupsi. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk mengkaji pentingnya persepsi tentang integritas dan sikap anti korupsi pada kalangan Generasi Z di Kota Salatiga sebagai penerus bangsa di masa mendatang. Melalui metode penelitian kuantitatif jenis deskriptif, penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa Generasi Z di Kota Salatiga memiliki persepsi yang baik mengenai sikap anti korupsi yang dapat menjadi dasar bagi terhindarnya praktik-praktik korupsi. Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa persepsi akan integritas dan budaya anti korupsi memiliki peran penting dalam membangun dan mencegah sikap yang mengarah pada tindak pidana korupsi terutama di kalangan Generasi Z di Kota Salatiga.

Kata Kunci: Anti korupsi, Generasi Z, integritas, Kota Salatiga.

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi permasalahan laten di banyak negara. Banyak permasalahan dan kerugian yang kemudian muncul dari tingginya kasus korupsi di suatu wilayah. Kerugian-kerugian tersebut biasanya bermuara pada terhambatnya target-target pembangunan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian pada masyarakat secara luas (IBAC, 2023). Sejak tahun 1995, Transparency International (TI) setiap tahun melakukan survei mengenai *Corruption Perception Index* (CPI) kepada seluruh negara-negara di dunia. Indeks ini berusaha menggambarkan dan mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari penggunaan layanan umum untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan layanan yang bebas korupsi di berbagai negara (Transparency International, 2022).

Data CPI-TI Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan tren penurunan dari tahun sebelumnya, di mana Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara responden, dengan skor 34 poin, atau turun delapan posisi dan memburuk 4 poin dibanding 2021 (DW, 2023). Skor CPI pada dasarnya berusaha menggambarkan bagaimana kondisi hukum, politik hingga sistem pemerintahan suatu negara mampu mencegah atau mengatasi kondisi yang dapat memicu tindak korupsi. Semakin tinggi skor persepsi suatu negara, maka semakin rendah korupsi yang terjadi di negara tersebut. Sebaliknya, semakin rendah nilai persepsi korupsi, maka semakin tinggi korupsi yang terjadi (Heizar, 2023).

Kondisi ini menyiratkan fakta yang cukup mengejutkan bagi bangsa Indonesia yang notabene merupakan salah satu negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai benteng dari perilaku korupsi (Sacipto & Ciptono, 2022). Terlebih dalam sistem demokrasi, seharusnya praktik-praktik semacam korupsi, maupun timpangnya kekuasaan dapat dihindari melalui sistem *check and balances* yang diusung melalui konsep *Trias Politica* Montesquieu (Sukma, 2023). Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia masih memiliki budaya laten dan sistemik dalam isu korupsi. Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekalipun, praktik-praktik yang mengarah pada tindak pidana korupsi masih banyak terjadi baik dari level desa hingga pusat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022 saja, Indonesia memiliki sebanyak 579 kasus korupsi yang sudah ditindak. Angka ini meningkat 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki 533 kasus (ICW, 2022).

International Monetary Fund (IMF) misalnya menyebut bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan, berbahaya dan dapat mengarah pada terciptanya krisis ekonomi. Lebih lanjut, IMF sendiri menyebutkan bahwa korupsi adalah sebuah budaya yang cukup sulit untuk diatasi, karena biasanya bersifat sistematis (Lagarde, 2018). Bahkan dalam data kasus korupsi di Indonesia sendiri, KPK menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan aktor, maka semakin besar pula kemungkinan untuk terjadi tindak pidana korupsi. Banyak juga ditemukan di Indonesia pelaku tindak pidana korupsi telah mengenyam pendidikan Magister dan Doktor (*well educated*). Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan seseorang tidak berbanding lurus dengan integritas atau perilaku anti korupsi yang dimilikinya (Kemdikbud, 2020).

Merespons permasalahan ini, sebagai ujung tombak dari pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia, KPK mengatakan bahwa integritas adalah salah satu kunci utama dalam pencegahan terjadinya kasus korupsi. Sikap-sikap seperti jujur, disiplin, mandiri, hingga sederhana menjadi beberapa contoh dari sikap integritas tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud RI) misalnya

menyebut bahwa salah satu kunci dalam pencegahan korupsi adalah melalui kesadaran akan integritas seseorang (Kemdikbud, 2022). Perilaku anti korupsi hanya akan terwujud jika seseorang memiliki integritas untuk tidak melakukan hal tersebut. Terbukti bahwa tingginya status pendidikan tidak semakin mengurangi tingginya kasus korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, integritas yang baik hanya dapat dibentuk dan ditumbuhkan melalui bangku pendidikan. Maka dari itu, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter individu agar dapat memiliki integritas dan sikap anti korupsi.

Salah satu kajian sebelumnya yang mencoba membahas mengenai keterkaitan pendidikan dan korupsi berasal dari (Handayani, 2009). Tulisan Handayani mencoba membahas betapa bahayanya tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan. Selain akan berdampak pada timpangnya pemerataan pembangunan, juga sama saja dengan ingkarnya tanggung jawab negara sebagai penjamin pendidikan warganya, jika korupsi dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan. Lebih lanjut, Handayani menjelaskan bahwa pendidikan formal dan informal perlu secara berkesinambungan mengajarkan risiko besar yang akan dihadapi ketika sikap anti korupsi tidak dimiliki oleh individu sejak di bangku sekolah. Senada dengan Handayani, (Malih, 2017) mencoba menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci penting mengenai kesadaran sikap anti korupsi. Penanaman sikap anti korupsi menurutnya perlu menjadi kunci bahwa tindakan dan perilaku semacam itu adalah sikap tabu yang perlu untuk dihindari. Malih lebih lanjut menggambarkan dalam situasi pendidikan di Aceh yang memerlukan dorongan dan interaksi agama untuk dapat menciptakan sikap sadar bahwa perilaku korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Dalam tulisan (Widodo, 2019) dijelaskan sebuah argumen menarik tentang bagaimana pendidikan sebenarnya mampu menjadi ujung tombak pencegahan korupsi. Widodo menegaskan bahwa sikap anti korupsi dan integritas untuk tidak melakukan korupsi bisa diperkuat melalui mata pelajaran dan kurikulum yang dimiliki. Misalnya dalam hal ini melalui mata pelajaran Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan sudah dapat ditemukan sebuah benang merah atau landasan untuk menggambarkan bahayanya tindak korupsi bagi diri sendiri dan masyarakat secara luas. Dari beberapa kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, setidaknya kita dapat memahami argumen yang kuat yang coba dinarasikan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya mencoba untuk menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan sikap anti korupsi. Meskipun demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin terhindarkannya individu dari perilaku korupsi. Integritas diperlukan sebagai sebuah landasan dasar yang tidak hanya didapatkan melalui pendidikan, namun juga sektor informal. Sebab, integritas adalah kunci utama dari sikap anti korupsi.

Untuk menghadirkan kajian yang baru, penulis berusaha mengkaji hubungan mengenai integritas dan sikap anti korupsi yang perlu ditanamkan pada anak-anak muda. Mengingat bahwa persepsi akan integritas dan sikap anti korupsi menjadi kunci utama dalam pencegahan tindak korupsi. Melalui dasar tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana persepsi Generasi Z (Lahir 1997-2012) terhadap integritas dan sikap anti korupsi (Rakhmah, 2021). Generasi Z menjadi subjek penelitian atas dasar fakta bahwa mereka nantinya akan berkontribusi pada tingginya bonus demografi bangsa Indonesia. Sehingga atas dasar kondisi tersebut, diperlukan sebuah integritas yang melandasi Generasi Z yang mayoritas masih berada pada bangku pendidikan untuk sadar akan pentingnya integritas dan bahayanya tindak korupsi. Maka dari itu, sebagai sebuah dasar yang kuat dan baik, kajian ini berusaha mengkaji sejauh mana persepsi yang mereka miliki terhadap integritas dan sikap anti korupsi khususnya

di Kota Salatiga. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan gambaran faktual tentang kondisi integritas dan sikap anti korupsi di kalangan Generasi Z khususnya di wilayah Kota Salatiga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berfokus pada kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gejala sosial. Penelitian ini menggunakan perhitungan kuantitatif pada data angka dan survei yang selanjutnya dipaparkan secara deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan 46 buah pertanyaan dan/atau pernyataan yang dikembangkan dari 8 indikator atau variabel penelitian. Adapun indikator atau variabel penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: (1) Pemahaman tentang integritas; (2) Permisivitas individu; (3) Pengalaman akan situasi korupsi; (4) Permisivitas lingkungan sosial; (5) Pengetahuan tentang integritas dan anti korupsi; (6) Peran nilai dan sikap; (7) Nilai individu; dan (8) Komitmen dalam membangun integritas dan anti korupsi. Penelitian ini menggunakan populasi sampel Generasi Z di Kota Salatiga pada tahun 2022 dengan menggunakan teknik Kuota Random Sampling, di mana penulis secara acak mengambil anggota sampel dari populasi Generasi Z di Kota Salatiga yang berusia 14-25 tahun pada tahun 2022. Adapun setelah menggunakan rumus Slovin, ukuran sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 395 orang. Selain itu, Generasi Z di Kota Salatiga dipilih atas dasar tingginya jumlah Generasi Z di wilayah Kota Salatiga, serta pertimbangan lokasi dan wilayah penelitian yang terjangkau oleh penulis.

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Generasi Z di Kota Salatiga

Survei ini melibatkan Generasi Z yang berada di dan berjumlah 395 responden sesuai dengan jumlah perhitungan sampel Slovin. Adapun responden ini merupakan masyarakat asli kota Salatiga yang memiliki rentang umur 14-25 tahun. Sesuai dengan kriteria tersebut, 395 responden yang mengisi survei tersusun dari 195 laki-laki dan 200 merupakan perempuan. Adapun data sebaran umur berdasarkan jenis kelamin dapat secara jelas dilihat melalui Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Usia dan Jenis Kelamin Responden

| Usia | Jenis Kelamin Responden | | Total |
|--------------|-------------------------|------------|------------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| 14 -17 | 16 | 20 | 36 |
| 18 - 21 | 84 | 121 | 225 |
| 22 - 25 | 65 | 59 | 134 |
| Total | 195 | 200 | 395 |

Sumber: Analisis Data Primer Penulis (2023).

Dari Table 1 dapat dilihat antusiasme untuk mengisi survei persepsi Generasi Z terhadap integritas dan sikap anti korupsi yang dapat dikatakan cukup berimbang antara perempuan dan laki-laki, dan hanya menyisakan margin sebesar 5 orang. Sehingga perbedaan jumlah ini tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam interpretasi dan juga analisis data yang ada. Distribusi dari segi kelompok umur responden terdiri dari kelompok umur 14-17 tahun (36 responden), 18-21 tahun (225 responden), dan 22-25 tahun (134 responden). Adapun dari hasil survei tersebut, distribusi responden berdasarkan umur didominasi oleh kelompok umur 18-21 tahun dan 22-25 tahun. Sebaran umur ini dapat kita asumsikan sebagai

kelompok usia yang sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, dan juga merupakan usia memasuki perguruan tinggi atau bekerja. Umur 18 tahun ke atas adalah umur yang menandakan seseorang sudah punya kestabilan dalam emosi dan kebanyakan orang sudah mempunyai pikiran yang matang.

Tabel 2. Distribusi Pendidikan Responden

| Pendidikan | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------|------------------|-----------------------|
| SMP | 9 | 2,3 |
| SMA/SMK | 277 | 70,1 |
| D3 | 8 | 2,0 |
| D4/S1 | 101 | 25,6 |
| Total | 395 | 100 |

Sumber: Analisis Data Primer Penulis (2023).

Distribusi kriteria pendidikan dari responden mengenai survei persepsi Generasi Z terhadap integritas dan anti korupsi, kebanyakan sudah mempunyai taraf pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun mereka yang sedang atau sudah pernah berkuliah. Responden survei ini adalah orang yang berpendidikan (*well educated*), dan memiliki pengetahuan serta pengalaman dari jenjang pendidikan terakhir yang terdiri dari SMP, SMA, D3, D4/S1 atau Kuliah yang secara rinci dapat dilihat melalui Tabel 2. Adapun tingkat distribusi pendidikan ini memberikan gambaran hasil survei ini terdiri dari responden latar belakang tingkat pendidikan yang beragam. Dengan fakta ini maka pendapat yang dimiliki oleh pengisi survei ini merupakan tanggapan yang berkualitas, dikarenakan responden mempunyai pendidikan yang sudah cukup dan juga tinggi yang tentunya juga memiliki wawasan tentang korupsi dan integritas baik saat di sekolah, pekerjaan, dan kehidupan dimasyarakat.

Korelasi antara Integritas dan Sikap Anti Korupsi

Berdasarkan data yang diumumkan oleh ICW, kasus korupsi di Indonesia mayoritas didominasi oleh individu atau aktor dengan pendidikan tinggi atau minimal berada pada level perguruan tinggi. Bahkan KPK menyebutkan bahwa data kasus korupsi di Indonesia banyak didominasi oleh lulusan Magister dan Doktor. Kasus korupsi di Indonesia sekitar 58% didominasi oleh lulusan Magister, Doktor sebesar 15%, dan Sarjana sebanyak 27%. Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan yang tinggi (*well educated*) tidak membuat seseorang menghindari praktik atau tindak pidana korupsi (Setyawan, 2018). Asian Development Bank (ADB) dalam kajiannya mengenai korelasi antara korupsi dan integritas menyebutkan bahwa tindakan atau praktik korupsi merupakan tindakan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah (ADB, 2010). Jadi dapat dikatakan bahwa memang korupsi bisa muncul ketika seorang individu memiliki celah atau kesempatan yang lebih besar dalam mengakses sumber daya.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan individu tidak memberikan jaminan akan terhindarnya individu tersebut dari tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, dibutuhkan sebuah sikap integritas sebagai landasan dasar untuk menghindari praktik-praktik korupsi. Dalam kajian dan tradisi filsafat moral, integritas dikelompokkan ke dalam kategori nilai yang disebut dengan ‘virtue of integrity.’ Istilah ini diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai sebuah konsep yang kompleks. Aristoteles menyebutkan bahwa dalam kehidupan sosial, masyarakat yang pertama dan terpenting bisa tunduk pada godaan yang mungkin menuntunnya untuk

melakukan tindakan yang tidak adil. *Virtue of integrity* menurut Aristoteles dibangun dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai sebuah pendidikan yang memadai dalam suatu lingkungan yang membentuk kebiasaan untuk menanamkan *virtue of integrity* tersebut. Aristoteles percaya bahwa pendidikan dan latihan yang intens dapat membentuk dan menanamkan konsep tentang integritas sebagaimana dipahami oleh Aristoteles (Jacquinot, 2021).

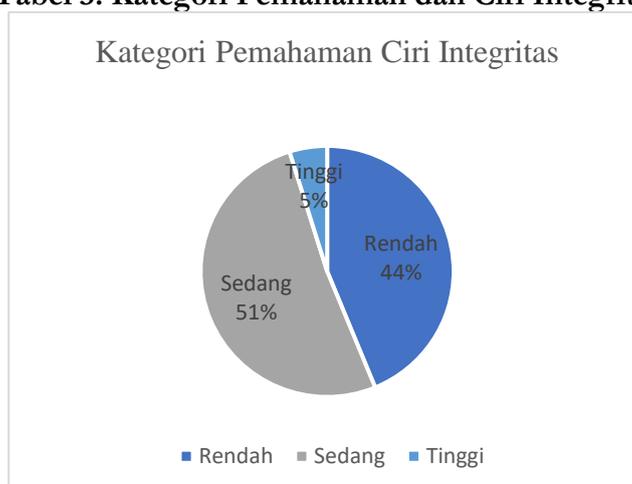
Meskipun demikian, dalam konsep integritas yang diusung oleh Aristoteles dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat mengganggu jalannya integritas individu. Godaan-godaan yang ada dalam lingkup institusi dan masyarakat dapat mempengaruhi sikap seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Lingkungan sosial oleh karenanya, seperti keluarga, pendidikan, tempat bekerja juga ikut mendorong pada bagaimana individu tidak melakukan tindak melakukan praktik-praktik korupsi. Maka dari itu, integritas individu dapat diuji sebagai integritas publik pada saat berhasil memegang teguh sikap untuk menghindari praktik-praktik korupsi. ADB dalam hal ini menyebutkan bahwa ketika korupsi dan integritas tidak selaras, maka akan menciptakan tindakan-tindakan yang mengarah pada praktik korupsi. Integritas merujuk pada kualitas moral dan etika yang melibatkan tindakan yang jujur, adil, dan bertanggungjawab. Ketika integritas tinggi dalam suatu sistem atau organisasi, korupsi akan cenderung rendah, dan begitu juga sebaliknya (ADB, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya memang pendidikan memainkan kunci penting dalam menumbuhkan sikap atau apa yang disebut dengan Aristoteles sebagai *virtue of integrity*. Pendidikan yang tinggi terbukti tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada praktik korupsi. Akan tetapi, menurut Pierre Bourdieu, kebiasaan seseorang akan mampu membentuk karakter orang tersebut. Maka untuk membentuk sikap atau integritas dari seorang individu diperlukan sebuah penanaman berulang (*habitus*) akan konsep integritas (Gillespie, 2019). Ketika konsep ini terbentuk, maka dapat dipastikan bahwa individu dapat membentengi diri sendiri dengan sikap integritas untuk tidak mempraktikkan tindak pidana korupsi. Kesadaran mengenai sikap integritas dan budaya yang mengarahkan bahwa praktik korupsi adalah sesuatu yang berbahaya perlu untuk diperluas dan ditegaskan dalam kesadaran individu. Maka dari itu, melalui metode penelitian kuantitatif berbasis survei kesadaran integritas dan sikap anti korupsi Generasi Z di Kota Salatiga, kajian ini berusaha menggambarkan mengenai kesadaran Generasi Z mengenai bahayanya praktik korupsi jika tidak dibarengi dengan integritas individu.

Pemahaman tentang Nilai dan Prinsip Integritas Generasi Z di Kota Salatiga

Pembentukan karakter Generasi Z yang memiliki integritas tinggi dan sikap anti korupsi dapat dimulai dengan memetakan pemahaman ciri integritas itu sendiri dalam sikap Generasi Z. adapun pemahaman ini akan menuntun pada kategori sikap integritas Generasi Z yang dapat diukur pada kriteria persetujuan terhadap ciri integritas yang tegas dan abu-abu, berikut beberapa hasil olahan data deksriptif dari survei Generasi Z di Kota Salatiga mengenai integritas dan sikap anti korupsi yang dapat secara jelas dilihat melalui Tabel 3 (Diagram).

Tabel 3. Kategori Pemahaman dan Ciri Integritas



Sumber: Analisis Data Primer Penulis (2023).

Berdasarkan dari data diagram di atas, terlihat bahwa sebagian responden memiliki tingkat pemahaman ciri integritas dalam kategori sedang yakni 51%, tinggi 5%, dan rendah sebesar 44%. Dari data grafik tersebut pemahaman integritas dari Generasi Z kota Salatiga masih didominasi oleh pemahaman integritas yang sedang atau cukup. Meskipun demikian masih terdapat 44% dari Generasi Z kota Salatiga yang memiliki pemahaman ciri integritas yang masih rendah. Hal ini dapat menjadi celah kelemahan yang akan berdampak pada sikap dan tindakan yang akan mereka ambil di masa depan. Lebih lanjut kriteria integritas ini dapat diidentifikasi dari tingkat persetujuan responden terhadap ciri integritas yang terdiri dari integritas yang tegas. Dalam kajian yang dilakukan penulis, penulis kemudian menyertakan beberapa pertanyaan yang dikembangkan dari variabel yang telah disebutkan penulis sebelumnya. Pada Tabel 4 di bawah dapat dilihat secara rinci mengenai tingkat persetujuan responden Generasi Z di Kota Salatiga terhadap nilai dan prinsip yang mereka yakini.

Tabel 4. Tingkat Persetujuan Responden terhadap Nilai dan Integritas

| No. | Pernyataan | Frekuensi | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Tahu |
| 1 | Kekayaan lebih penting daripada kejujuran | 341 86,3% | 31 7,8% | 23 5,8% |
| 2 | Kejujuran lebih penting daripada kekayaan | 12 3,0% | 362 91,6% | 21 5,3% |
| 3 | Kesuksesan lebih mudah dicapai tanpa integritas | 275 69,6% | 64 16,2% | 56 14,2% |
| 4 | Kejujuran dan integritas akan menghasilkan kesuksesan | 10 2,5% | 362 91,6% | 23 5,8% |
| 5 | Peningkatan pendapatan keluarga lebih penting daripada kejujuran/integritas | 268 67,8% | 52 13,2% | 75 19,0% |
| 6 | Integritas lebih penting daripada peningkatan pendapatan keluarga | 61 15,4% | 226 57,2% | 108 27,3% |

Sumber: Analisis Data Primer Penulis (2023).

Integritas sangat berkaitan erat pada perilaku yang selaras dengan posisi internal dan eksternal seseorang yang berusaha menunjukkan sikap konsistensi. Menurut Peikoff, integritas merupakan sebuah komitmen akan nilai-nilai yang diyakini (Wisera, 2011). Pada pengukuran persetujuan terhadap responden sebagaimana Tabel 4 di atas dibuat dalam

bentuk pernyataan yang terdiri dari 3 kategori yakni: tidak setuju, setuju dan tidak tahu. Berdasarkan dari Tabel 4 di atas, tingkat persetujuan responden terhadap nilai dan prinsip yang diyakini, mayoritas lebih memilih kejujuran daripada kekayaan, di mana persentasenya mendekati 100%. Nilai dan keyakinan lainnya, misal nilai integritas pada diri seseorang untuk mencapai kesuksesan, atau nilai meningkatkan pendapatan keluarga, ternyata didominasi dengan jawaban mayoritas Generasi Z yang lebih memilih integritas pada situasi tersebut. Contoh lain dari Tabel 4 di atas yakni, nilai yang diyakini bahwa kejujuran dan integritas akan menghasilkan kesuksesan memiliki persentase sebesar 91,6%. Nilai-nilai ini pada akhirnya menjadi dasar bagi peneliti untuk memberikan argumen bahwa Generasi Z di Kota Salatiga masih memiliki keyakinan akan sikap integritas yang baik untuk berkata tidak pada korupsi.

Integritas dan Sikap Anti Korupsi di Indonesia: Analisis Survei Generasi Z Kota Salatiga

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Indonesia akan memiliki bonus demografi yang menjanjikan di kisaran tahun 2030-2045 mendatang yang didominasi oleh Generasi Z. Bonus demografi ini akan mengantarkan Indonesia pada kondisi di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding penduduk dengan usia non-produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih besar dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia (Kominfo RI, 2020). Maka dari itu, kondisi ini perlu dipersiapkan dengan kondisi yang matang dan terencana, agar bisa menjadi modal utama bagi keberhasilan ekonomi dan pemerataan pembangunan fisik dan non-fisik (manusia) di Indonesia. Salah satu persiapan penting yang perlu dilakukan adalah dengan mempersiapkan mental dan integritas Generasi Z yang akan mendominasi masa kepemimpinan di periode 2030-2045 mendatang.

Persiapan mengenai kesiapan integritas dan mental menjadi penting untuk dipersiapkan. Sebab tanpa adanya kesiapan mengenai integritas yang dimiliki oleh seorang individu, maka akan menyebabkan banyaknya kasus-kasus pelanggaran dan penyelewengan kekuasaan yang pada akhirnya akan bermuara pada sikap koruptif yang menyebar di lingkungan pemerintahan dan swasta. Kemdikbud RI menyebutkan bahwa integritas menjadi dasar utama bagi individu untuk membentengi diri dari berbagai sikap-sikap tidak terpuji dan tidak bertanggungjawab seperti korupsi, pencurian, dan sebagainya. Dengan adanya integritas, maka dapat dipastikan bahwa individu memiliki nilai moral yang mampu menjaga sikap dan tindakan mereka untuk memilih tindakan mana yang patut dilakukan dan tidak. Sikap-sikap seperti inilah yang sangat perlu untuk diwujudkan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada periode mendatang.

Generasi Z sendiri dicirikan memiliki karakter yang mahir dan cakap akan teknologi, memiliki tingkat jejaring dan komunikasi yang baik, kerap mengumbar privasi, mandiri, toleran dan cenderung ambisius akan keinginan yang dimilikinya. Sejumlah karakteristik khas ini memberikan atmosfer dan kekuatan bagi Generasi Z dalam berjuang untuk melawan korupsi. Sebab, tanpa adanya kesadaran akan pentingnya integritas dan sikap untuk melawan korupsi, Generasi Z di masa mendatang akan terjerumus dalam lingkaran tindakan yang sama sebagaimana Generasi Baby Boomer dan Generasi X banyak terjerat kasus korupsi di era saat ini (Nursasi, 2021). Sehingga diperlukan sebuah upaya untuk menciptakan kesadaran dan benteng bagi integritas Generasi Z sebagai kelompok yang nantinya akan menjadi calon pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Korupsi pada dasarnya bagaikan virus yang mampu menyebar dan menular terhadap siapapun. Sikap dan tindakan korupsi tidak mengenal latar belakang dan juga atribut sosial

yang digunakan. Selagi kekuasaan tidak bisa dikontrol, iklim organisasi yang sifatnya tertutup dan struktur ekonomi yang berorientasi khusus pada laba dapat menciptakan kemungkinan-kemungkinan bagi terjadinya korupsi. Sistem Demokrasi Pancasila yang menjadi dasar Indonesia pada dasarnya sudah menjadi landasan dasar dan paling penting bagi warga negara Indonesia untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi. Dari penjabaran pasal-pasal Pancasila dapat dilihat dari bagaimana seharusnya individu bersikap dan bertindak untuk tidak merugikan orang lain melalui praktik-praktik yang mengutamakan kepentingan golongan dan kelompok tertentu. Sikap-sikap seperti ini yang pada akhirnya akan bermuara pada kepentingan secara struktural untuk hanya menguntungkan kelompok tertentu, atau dalam kondisi ini bisa kita sebut dengan sikap koruptif.

Demokrasi sejatinya berusaha untuk menciptakan sistem *check and balances* bagi sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat otoriter dan korup. Terciptanya pembatasan kekuasaan diharapkan dapat menjadi dasar bagi tidak berkuasanya salah satu golongan sebagaimana kita rasakan pada masa Rezim Soeharto yang dicirikan dengan pemerintahan yang korup dan melanggengkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pada faktanya setelah Rezim Soeharto runtuh sekalipun, praktik korupsi juga tidak benar-benar hilang dari bumi Indonesia. Kita malah kemudian bisa menemukan sebuah pola baru dalam pola praktik korupsi di Indonesia, seperti misalnya klien-patron. Hubungan klien-patron inilah yang pada akhirnya mendominasi praktik-praktik korupsi di Indonesia, yang mengedepankan korupsi bersama secara struktural melalui pemanfaatan jabatan dan kekuasaan (Widoyoko, 2018). Maka tidak heran jika data dari KPK mengatakan bahwa banyak kasus korupsi di Indonesia yang didominasi oleh aktor-aktor berpendidikan tinggi, seperti Sarjana, Magister, hingga Doktor (Setyawan, 2018).

Maka dari itu, melalui kajian survei yang sudah dilakukan penulis, penulis berusaha memberikan bagaimana gambaran yang dimiliki Generasi Z di Kota Salatiga sebagai sebuah representasi dari Generasi Z di Indonesia mengenai persepsi mereka akan tindakan-tindakan yang mengarah pada perilaku koruptif. Kesadaran ini menjadi penting, sebagaimana disebutkan oleh Aristoteles bahwa integritas menjadi dasar penting dari bagaimana manusia menyikapi kehidupan yang mereka miliki. Integritas menjadi patokan penting atau sebuah panduan mengenai ke mana manusia atau individu seharusnya melangkah. Bisa direpresentasikan bahwa tanpa adanya integritas maka individu atau manusia akan kesulitan untuk melangkah dan membedakan tindakan mana yang benar dan tidak benar (Jacquinot, 2021).

Terbukti bahwa tanpa adanya integritas, perilaku korupsi masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat demokratis atau non-otoriter, agamis, dan bahkan dengan status berpendidikan tinggi sekalipun. Pierre Bourdieu menyebut perlu adanya sebuah kebiasaan atau *habitus* yang dimiliki oleh seseorang. Kebiasaan apa yang seharusnya dimiliki untuk dapat menghindarkan dari praktik-praktik korupsi? Sikap yang memiliki integritas dan anti korupsi yang menjadi dasar dari bagaimana seharusnya individu mampu mencegah praktik korupsi. Kebiasaan mengenai kesadaran akan bahayanya sikap atau praktik korupsi di lingkungan apapun mampu mengantarkan individu untuk membentuk pola sikap anti korupsi (*habitus* anti korupsi) (Gillespie, 2019).

Pada survei mengenai 'Persepsi Generasi Z terhadap Integritas dan Anti Korupsi di Kota Salatiga,' penulis memberikan argumentasi bahwa dengan adanya kesadaran yang baik mengenai perilaku apa saja yang dapat mengarah pada praktik-praktik korupsi, dapat menciptakan nilai dan norma integritas pada individu. Penulis dalam hal ini memiliki target

responden survei sebanyak 395 orang dengan karakteristik umur dari rentang 14-25 tahun terhitung pada tahun 2022. Generasi Z tersebut umumnya masih didominasi oleh mereka yang berada pada bangku sekolah, dan hanya beberapa yang sudah bekerja secara mandiri.

Setidaknya dalam kajian survei yang dilakukan, penulis memiliki beberapa variabel yang dijadikan sebagai landasan dalam melihat bagaimana persepsi Generasi Z terhadap integritas dan sikap anti korupsi. Adapun beberapa pertanyaan tersebut berjumlah sekitar 46 buah pertanyaan yang dikembangkan dari 8 indikator atau variabel penelitian. Adapun indikator atau variabel penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: (1) Pemahaman tentang integritas; (2) Permisivitas individu; (3) Pengalaman akan situasi korupsi; (4) Permisivitas lingkungan sosial; (5) Pengetahuan tentang integritas dan anti korupsi; (6) Peran nilai dan sikap; (7) Nilai individu; dan (8) Komitmen dalam membangun integritas dan anti korupsi.

Misalnya pada kategori variabel pertama mengenai pemahaman tentang ciri integritas, sebanyak 10,6% responden (42 orang) menjawab tidak setuju untuk tidak pernah berbohong, sebanyak 82,5% responden (326 orang) setuju untuk jangan berbohong, dan sebanyak 6,8% responden (27 orang) menjawab tidak tahu. Sebanyak 10,6% responden (42 orang) menjawab tidak setuju untuk tidak pernah melanggar hukum, 79,2% responden (313 orang) setuju untuk tidak pernah melanggar hukum, serta hanya 10,1% (40 responden) yang menjawab tidak tahu. Selain itu, sebanyak 2,5% responden menjawab tidak setuju untuk tidak pernah melakukan korupsi, 91,1% responden (360 orang) setuju tidak pernah melakukan korupsi, dan hanya 6,3% responden (25 orang) yang menjawab tidak tahu. Dari dasar variabel pertama, sejatinya dapat disimpulkan bahwa banyak Generasi Z di Kota Salatiga yang sudah memiliki dasar penilaian yang baik mengenai dasar integritas dan sikap anti korupsi. Terbukti dari mayoritas responden menjawab bahwa setuju untuk tidak melanggar hukum, setuju untuk tidak melakukan korupsi, dan setuju untuk tidak berbohong.

Pada kategori variabel mengenai nilai dan prinsip yang diyakini, penulis berusaha menggambarkan kondisi yang mengarahkan pada tercapainya harapan dan cita-cita responden. Dengan dasar tersebut, penulis bisa menentukan apakah kemudian responden akan menghalalkan segala cara termasuk korupsi untuk mewujudkannya. Misal sebanyak 86,3% responden tidak setuju jika kekayaan lebih penting dari kejujuran, dan hanya 7,8% responden (31 orang) menganggap sebaliknya, serta 5,8% (23 orang) menjawab tidak tahu. Selain itu dalam kategori ini, sebanyak 69,9% responden (275 orang) menjawab tidak setuju pada pertanyaan kesuksesan lebih mudah dicapai tanpa integritas, serta 16,2% responden (64 orang) menjawab sebaliknya, serta 14,2% responden (56 orang) menjawab tidak tahu. Situasi ini menunjukkan adanya gambaran integritas yang baik pada kalangan Generasi Z untuk tidak mewujudkan 'segala cara' dalam mencapai tujuannya.

Pada kategori berikutnya yaitu variabel permisivitas individu berusaha ditunjukkan sebuah gambaran mengenai sikap toleransi individu terhadap kondisi yang mendukung praktik korupsi. Misalnya pada pertanyaan jika ada pegawai pemerintahan meminta uang tambahan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat, sebanyak 88,6% responden (350 orang) menjawab tidak setuju untuk melakukan itu, dan hanya 6,8% (27 responden) yang menjawab sebaliknya, dan hanya 4,6% (18 orang) yang menjawab tidak tahu. Pada pertanyaan berikutnya seperti jika ada orang yang melanggar hukum demi menolong keluarganya, sebanyak 48,1% responden (190 orang) menjawab tidak setuju untuk melakukannya, dan sebanyak 32,9% (130 responden) menjawab sebaliknya, serta 19,0% responden (75 orang) menjawab tidak tahu. Gambaran pada kategori permisivitas individu yang dicirikan dengan

situasi yang mendukung terciptanya praktik korupsi juga menunjukkan adanya mayoritas penolakan Generasi Z pada situasi yang mengarah pada praktik korupsi.

Berikutnya pada kategori variabel pengalaman yang bersinggungan dengan korupsi, berusaha ditunjukkan kondisi seperti apa yang membuat individu memiliki pengalaman yang bersinggungan dengan korupsi. Pada pertanyaan apakah ada yang menyuap ketika mengurus dokumen, sebanyak 77,5% responden (306 orang) menjawab tidak pernah melakukannya, dan sebanyak 15,7% responden (62 orang) menjawab sebaliknya, serta 6,8% responden (27 orang) menjawab tidak tahu. Pada kategori pertanyaan berikutnya, misalnya seperti apakah pernah terlibat suap untuk memperlancar bisnis, sebanyak 72,9% responden (288 orang) menjawab belum pernah atau tidak setuju, dan hanya 18,0% (71 orang) yang menjawab sebaliknya, serta 9,1% (36 orang) yang menjawab tidak tahu. Kondisi ini sejatinya juga memberikan gambaran bahwa mayoritas responden Generasi Z sudah sadar akan situasi apa yang dapat mengarahkan pada praktik korupsi dan perlu dihindari.

Dalam tujuannya, kajian ini berusaha memberikan gambaran mengenai kesadaran atau *awareness* individu atau dalam hal ini Generasi Z akan sikap-sikap yang dapat mengarahkan pada praktik korupsi. Kesadaran ini menjadi penting, sebab bagi Bourdieu pemahaman yang berulang akan suatu hal dapat dijadikan sebagai sebuah kebiasaan (*habitus*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini terbukti dari bagaimana banyaknya kasus korupsi di Indonesia saat ini yang melibatkan Generasi Baby Boomer dan Generasi X sebagai beberapa bagian dari kasus korupsi yang laten dan sifatnya terstruktur (*well educated person*). Orang-orang dengan pendidikan tinggi malah pada akhirnya terlibat dalam banyaknya tindak pidana korupsi. KPK bahkan menyebutkan jika mayoritas pelaku korupsi di Indonesia didominasi oleh mereka yang menempuh perguruan tinggi atau setidaknya bergelar Sarjana, Magister, hingga Doktor.

Meskipun pendidikan bisa dikatakan tidak memberikan jaminan kepastian bahwa seseorang tidak melakukan korupsi jika memiliki level pendidikan yang tinggi, namun pendidikan juga menjadi kunci akan penanaman integritas atau Aristoteles menyebut ini dengan *virtue of integrity*. Dengan adanya kesadaran akan integritas yang baik, maka dapat meningkatkan *awareness* bahwa perilaku korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji dan perlu untuk dihindari. Kesadaran ini menjadi penting untuk ada sebagai sebuah landasan Generasi Z melihat bahwa sikap-sikap koruptif akan memberikan dampak buruk pada diri sendiri dan orang lain, terutama pada aspek pembangunan nasional. Maka dari itu, melalui survei yang telah dilakukan penulis terhadap Generasi Z di Kota Salatiga diargumentasikan akan mampu memberikan kesadaran di masa saat ini dan masa mendatang ketika Generasi Z menjadi pemimpin pada masa bonus demografi di Indonesia untuk tidak melakukan korupsi.

Nilai-nilai dasar yang diukur melalui beberapa variabel survei yang telah dilakukan penulis berusaha menggambarkan bagaimana individu terutama Generasi Z jika dihadapkan pada pilihan-pilihan tertentu, penegasan integritas akan sikap anti korupsi, dan beberapa kategori lainnya sebagai landasan untuk mengarahkan dan menciptakan kesadaran sikap anti korupsi melalui integritas. Bourdieu menyebutkan bahwa ketika kebiasaan atau *habitus* ini mampu diciptakan, maka akan memberikan dampak yang lebih besar pada integritas pribadi untuk tidak melakukan praktik-praktik yang mengarah pada perilaku korupsi. Meskipun pendidikan yang tinggi tidak memberikan jaminan bagi seseorang untuk tidak melakukan korupsi, pendidikan tetap merupakan sarana penting dalam menciptakan apa yang disebut Bourdieu sebagai sebuah kebiasaan atau *habitus*.

Dalam kajian survei yang dilakukan penulis, dalam variabel pengetahuan akan integritas dan sikap anti korupsi, penulis berusaha melihat sejauh mana responden yang merupakan Generasi Z di Kota Salatiga pernah mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang anti korupsi. Sebanyak 90,1% responden Generasi Z di Kota Salatiga (356 orang) menyatakan bahwa pernah mendapatkan pelajaran dan pengetahuan tentang anti korupsi di sekolah maupun di universitas. Sedangkan hanya sebesar 9,9% (39 responden) yang menjawab belum pernah mendapatkan pelajaran dan pengetahuan tentang anti korupsi. Responden dalam hal ini juga mayoritas menjawab sudah mengetahui bahwa terdapat undang-undang tentang anti korupsi, di mana sebanyak 66,6% responden mengetahui tentang adanya undang-undang dan peraturan anti korupsi, dan hanya sebanyak 33,4% responden (132 orang) yang menyatakan tidak mengetahui terdapat undang-undang anti korupsi. Pada variabel peran generasi muda dalam mengupayakan dan mengembangkan sikap anti korupsi, sebanyak 98,0% responden (387 orang) setuju untuk mengembangkan integritas dan budaya anti korupsi, dan hanya sebanyak 2,0% responden (8 orang) yang tidak setuju untuk mengembangkan integritas dan budaya anti korupsi.

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sikap dan integritas Generasi Z di Kota Salatiga mengenai sikap anti korupsi sudah cukup baik. Terbukti dari adanya beberapa pertanyaan mengenai kesadaran akan sikap seperti apa yang mengarah pada perilaku korupsi, tindakan seperti apa yang mengarah pada perilaku korupsi, hingga adakah undang-undang atau peraturan yang mengatur korupsi dijawab responden Generasi Z dengan nilai yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sejatinya Generasi Z di Kota Salatiga sudah familiar dengan apa yang dimaksud dengan integritas, dan bagaimana perlu menegaskan sikap berkata tidak pada perilaku korupsi. Melalui survei ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pendidikan yang tinggi tidak memberikan jaminan bahwa pribadi tersebut tidak akan melakukan korupsi, pendidikan untuk menciptakan *habitus* integritas perlu dipertegas dan diulang agar individu memiliki kesadaran atau *virtue* jika berkaca dari Aristoteles. Dengan adanya kesadaran akan integritas yang kemudian dijadikan kebiasaan, maka akan mampu mengarahkan pada perilaku anti korupsi.

PENUTUP

Persepsi Generasi Z terhadap integritas dan sikap anti korupsi di Kota Salatiga dapat digambarkan pada sikap kondisi persetujuan mereka terhadap ciri integritas. Adapun ciri integritas seperti bersikap jujur, tidak pernah curang, dan dapat dipercaya, tidak pernah melanggar hukum, dan tidak melakukan korupsi (tidak menerima atau memberi suap) dalam kondisi apapun menjadi beberapa gambaran dasar yang melandasinya. Berdasarkan kriteria tersebut, kondisi Generasi Z di Kota Salatiga masih berada pada taraf atau sikap tegas untuk menolak korupsi. Generasi Z di Kota Salatiga secara umum memiliki sikap yang baik dalam wawasan dan pemahaman tentang integritas dan anti korupsi di mana kondisi ini tergambar dari sikap persetujuan mereka untuk lebih memilih kejujuran daripada kekayaan dan sikap-sikap lainnya. Generasi Z di Kota Salatiga dalam hal ini juga lebih memilih berkomitmen pada sikap integritas pada situasi dan kondisi yang dihadapkan pada situasi yang mendukung praktik korupsi.

Melalui survei ini, penulis menyimpulkan bahwa kesadaran ternyata memberikan dampak yang penting bagi terciptanya prinsip integritas. Sebab, bukti menunjukkan bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan praktik korupsi. Maka dari itu, Bourdieu juga menyebutkan bahwa prinsip integritas perlu menjadi sebuah kebiasaan atau *habitus* bagi seseorang untuk bisa menolak praktik korupsi. Kajian kuantitatif

ini pada akhirnya dapat menjadi contoh yang mampu digeneralisir dalam mempertimbangkan kebijakan anti korupsi dan prinsip integritas. Mengingat bahwa Generasi Z di masa mendatang akan berperan sebagai pemimpin di era bonus demografi Indonesia. Sebagai dukungan dari kehidupan demokrasi yang baik di Indonesia selanjutnya, penanaman prinsip integritas adalah salah satu kunci penting bagi terjadinya praktik-praktik korupsi di Indonesia yang masih bersifat laten dan struktural bahkan dalam kehidupan demokratis sekalipun

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2010). *Anti Korupsi dan Integritas*.
- DW. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi 2022 Dirilis, Indonesia Memburuk*. DW News.
- Gillespie, L. (2019). *Pierre Bourdieu: Habitus*. Critical Legal Thinking (CLT).
- Handayani, T. (2009). *Korupsi Dan Pembangunan Pendidikan Di Indonesia*. IV(2), 15–34. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3838>
- Heizar, E. (2023). *Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?* Tempo.
- IBAC. (2023). *The Impacts of Corruption*.
- ICW. (2022). *Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022*. Indonesia Corruption Watch (ICW).
- Jacquinot, P. (2021). The social role of the virtue of integrity : an Aristotelian perspective. *Ideas*.
- Kemdikbud. (2020). *Direktur KPK: Orang yang Melakukan Korupsi Paling Banyak Berpendidikan Tinggi*. Kemdikbud RI.
- Kemdikbud. (2022). *Cegah Tindak Korupsi dengan Menerapkan 9 Nilai Integritas*. Kemdikbud RI.
- Kominfo RI. (2020). *Komitmen Pemerintah Wujudkan Bonus Demografi yang Berkualitas*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
- Lagarde, C. (2018). *There's a reason for the lack of trust in government and business: corruption*. IMF. <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2018/05/04/theres-a-reason-for-the-lack-of-trust-in-government-and-business-corruption>
- Malih, S. (2017). Penanaman Rasa Tabu Korupsi Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 3(2), 11–33. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v3i2.3272>
- Nursasi, A. (2021). *Posisi Gen-Z dalam Gerakan Sosial Anti Korupsi*. Tempo. <https://www.indonesiana.id/read/153232/posisi-gen-z-dalam-gerakan-sosial-anti-korupsi>
- Rakhmah, D. N. (2021). *Gen Z Dominan, Apa Maksudnya bagi Pendidikan Kita?* Kemdikbud RI.
- Sacipto, R., & Ciptono. (2022). PEMBENTUKAN KARAKTER ANTI KORUPSI BERLANDASKAN IDEOLOGI PANCASILA. *Jurnal Pacasila*, 3(1).
- Setyawan, F. A. (2018). *KPK: Koruptor Paling Banyak Lulusan S2*. CNN Indonesia.
- Sukma, R. (2023). *Korupsi dan Demokrasi*. Kompas.
- Transparency International. (2022). *Transparency International - Corruption Index*.
- Widodo, S. (2019). Membangun Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 35–44. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpd/issue/view/908>
- Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan. *Integritas*, 4(2), 1–23.
- Wisesa, A. (2011). Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis. *Teknologi, Jurnal Manajemen*.